BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan mengenai analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* www.bkkbn.go.id untuk meningkatkan Sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi data infrastruktur dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website* www.bkkbn.go.id dalam meningkatkan Sosialisasi KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat belum dapat terpenuhi secara optimal, hal ini disebabkan tidak adanya ketetapan prosedur kegiatan sehingga belum adanya standarisari yang dijadikan pedoman dalam memberikan informasi yang baik ke dalam SSIM-PKBN yang ada dalam *website* www.bkkbn.go.id karena BKKBN Jawa Barat masih mengikuti arahan dari BKKBN pusat. Jumlah tempat penyimpanan data itu sendiri masih kurang sehingga data yang diperoleh tidak tersusun dengan rapi dan beberapa instansi masih belum memahami tentang kegunaan SSIM-PKBN yang ada dalam *website* www.bkkbn.go.id untuk mensosialisasikan Keluarga Berencana kepada masyarakat.
2. Ketersediaan dasar hukum dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website* www.bkkbn.go.id dalam meningkatkan

Sosialisasi KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat sudah tersedia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, akan tetapi belum terdapat peraturan secara teknis yang mendasari dalam pelaksanaan penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan Sosialisasi KB di BKKBN Jawa Barat, hal tersebut disebabkan karena di BKKBN Jawa Barat belum memiliki lembaga khusus seperti KPDE yang mengelola penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* masih mengikuti arahan dari BKKBN pusat.

3. Koordinasi antar instansi dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website* *www.bkkbn.go.id* dalam meningkatkan Sosialisasi KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik, namun yang menjadi kendala adalah dalam melakukan komunikasi melalui jaringan komputer sebagai salah satu sarana untuk lebih memudahkan dalam memberikan data. Kendala yang dihadapi tersebut dikarenakan jumlah aparatur di setiap instansi yang dapat menggunakan jaringan komputer masih terbatas. Selain itu belum adanya petunjuk teknis dalam penggunaaan jaringan komputer tersebut sehingga terkadang menyulitkan aparaturnya sendiri.
4. Ketersediaan aparatur dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* untuk meningkatkan Sosialisasi KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat belum cukup memadai hal dikarenakan jumlah aparatur yang ada di bidang IKAP BKKBN Provinsi Jawa Barat yang khusus mengelola SSIM-PKBN tidak mencukupi selain itu

jumlah aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer sebagai sarana dalam berbagi informasi antar instansi masih terbatas.

5. Ketersediaan sarana teknologi dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* www.bkkbn.go.id untuk meningkatkan Sosialisasi KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat sudah memadai dan layak untuk dipergunakan, akan tetapi yang menjadi kendala adalah sarana yang telah ada terkadang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya., hal ini disebabkan tidak adanya divisi pemeliharaan sarana teknologi itu sendiri. Selain itu jumlah komputer yang telah ada seperti spesifikasi dan *software-softwarenya* perlu ditingkatkan agar penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan Sosialisasi KB baik lagi dalam memberikan informasi tentang KB kepada masyarakat.
6. Strategi pemikiran pemimpin dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website www.bkkbn.go.id* dalam meningkatkan Sosialisasi KB di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari strategi yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang memilki Visi Misi, *grand strategi*, kesadaran yang tinggi, *skill* yang memadai, serta pemimpin yang mempunyai komitmen. Pemimpin BKKBN Provinsi Jawa Barat sudah cukup memadai dengan melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi ditunjang oleh pengetahuan pemimpinnya ada di atas rata-rata bawahannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kondisi data infrastruktur dalam Analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website www.bkkbn.go.id* dalam meningkatkan Sosialisasi KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat hendaknya membentuk sebuah lembaga yang mengelola secara khusus tentang penerapan *E-Government* tidak hanya mengandalkan dari BKKBN pusat saja. Sehingga dapat membentuk ketetapan prosedur kegiatan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN. Selain itu dengan adanya lembaga tersebut proses sosialisasi tentang Keluarga Berencana akan lebih terperinci dengan baik.
2. Ketersediaan dasar hukum hendaknya dibuat peraturan secara teknis tentang pelaksanaan penerapan *E-Government* khususnya SSIM-PKBN yang ada dalam *website www.bkkbn.go.id* di BKKBN Provinsi Jawa Barat mulai dari tingkat Desa sampai Provinsi agar memiliki ketetapan hukum, dengan adanya peraturan secara teknik dalam proses pengolahan data menjadi informasi kedalam SSIM-PKBN tidak akan mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan KB kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat.
3. Koordinasi antar instansi dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website www.bkkbn.go.id* dalam meningkatkan Sosialisasi KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Kordinasi antar intansi perlu di tingkatkan lagi mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat provinsi supaya

tidak terjadi dis komunikasi dalam mensosialisasikan KB kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang KB.

4. Ketersediaan aparatur dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website www.bkkbn.go.id* di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Seharusnya ada penambahan aparatur ahli yang sesuai dengan yang dibutuhkan yang dapat mengolah data menjadi informasi ke dalam SSIM-PKBN agar informasi tentang KB dapat di ketahui oleh Masyarakat dengan cepat dan tepat waktu.
5. Ketersediaan sarana teknologi dalam Analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website www.bkkbn.go.id* di BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB di Provinsi Jawa Barat. Ketersediaan sarana teknologi, hendaknya lebih menekankan pada pemeliharaannya, dengan demikian maka saran teknologi yang sudah ada dapat digunakan sebagaimana mestinya.Supaya sosialisasi KB tidak mendapat gangguan yang berarti agar masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi tentang KB.
6. Strategi pemikiran pemimpin dalam Analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website www.bkkbn.go.id* dalam meningkatkan Sosialisasi KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Hendaknya lebih ditingkatkan lagi baik pengetahuan pemimpin tersebut maupun keahlian dalam bidang penerapan *E-Government* khususnya SSIM-PKBN yang ada dalam *website www.bkkbn.go.id* dan memiliki strategi lagi yang lebih tepat dalam mensosiliasikan KB pada masyarakat dan pemimpin harus bisa

memotifasi para aparaturnya dalam melaksanakan tugas yang di berikan atasan ke bawahan dalam meningkatkan sosialisasi tentang KB.